

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS PARIWISATA
2025**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

1. Tujuan Lakip
2. Manfaat Lakip

C. PROFIL ORGANISASI

1. Dasar Hukum SKPD / Unit
2. Aspek Strategis SKPD
 - a. Tugas Pokok
 - b. Fungsi
3. Struktur Organisasi
 - a. Menurut Struktur Jabatan
 - b. Bagan Struktur
4. Sumber Daya Manusia Pegawai
5. Sarana dan Prasarana

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas bimbingan dan penyertaanNya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ini telah diselesaikan dengan baik. Kami sadar bahwa LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk penyempurnaannya terutama menjadi masukan bagi kami dalam menyusun LAKIP kedepan dengan lebih baik lagi.

Tambolaka, Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Christofel Horo, SH
NIP. 19680225 199903 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun Rencana Kinerja dengan penetapan kinerja kegiatan untuk mengukur keberhasilan atas terlaksananya misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

- Sasaran III “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Untuk maksud tersebut kami telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 yang perlu di Evaluasi untuk pelaksanaan perencanaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari sasaran di atas adalah sebesar 62,45%. Hasil ini mencerminkan kinerja Dinas Pariwisata selama tahun 2025. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui dalam 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan empat indikator kinerja pencapaian sasaran (termasuk kegiatan penunjang) yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Terjadinya keterlambatan penyaluran karcis parkir sehingga tidak ada penarikan selama beberapa bulan yang menjadi salah satu penyebab PAD yang telah di tetapkan tidak tercapai.
- Kesiapan SKPD dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan masih sangat minim dan belum menentukan skala prioritas.
- skill teknis SDM sangat terbatas.
- Sarana dan prasarana masih kurang.
- Budaya dan etos kerja masih rendah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyebarluasan Informasi, tingkat pencapaian kinerja 88,26%.

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala, yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang terwujudnya sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019-2025.

Secara keseluruhan, Dinas Pariwisata telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp 4.173.305.209,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp

3.633.367.220,- atau 87,06%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 1 (satu) sasaran strategis adalah Rp **2.425.365.466,-**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. **2.026.250.329,-** atau 83,54%.

Tambolaka, Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Christofel Horo, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19730812199903100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan yang menjadi sebuah ukuran yang ditetapkan dalam rangka mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan fungsi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Melalui laporan – laporan pertanggungjawaban serta informasi seperti ini, tingkat keakuratan dan efektifitas pelaksanaan kinerja Pemerintahan Daerah dapat terus diukur dan ditingkatkan sesuai perkembangan kondisi yang terjadi serta tuntutan perubahan baik global, regional maupun lokal dengan tetap memperhatikan Kebijakan Program Pembangunan Nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam Program Pembangunan masing – masing Daerah sesuai kondisi dan karakteristik khas setiap wilayah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

1. Tujuan LAKIP

Memberikan dukungan informasi dan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025.

2. Manfaat

Dalam rangka menginformasikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang.

C. PROFIL ORGANISASI

1. Dasar Hukum SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Dinas Pariwisata mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah

2. Aspek Strategis SKPD

a. Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Dinas Pariwisata mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah:

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas maka Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Bidang Pemasaran Pariwisata
3. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
1. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan

(5) UPTD

a. Bagan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Organisasi Daerah kabupaten Sumba Barat Daya. maka Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok yakni ***melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati***

4. Sumber Daya Manusia Pegawai

Keadaan pegawai Dinas Pariwisata sampai dengan Bulan Desember 2025 saat ini sebanyak 27 orang, 25 orang PNS dan 2 orang Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

- a. Menurut latar belakang pendidikan :
 - Magister (S2) : 1 orang
 - Sarjana (S1) : 18 Orang
 - D3 : 3 Orang
 - SLTA : 5 Orang

- b. Menurut golongan :
 - Golongan I = 0 orang
 - Golongan II = 3 orang
 - Golongan III = 19 orang
 - Golongan IV = 5 orang
 - Golongan IX (P3K) = 3 orang
 - Golongan V (P3K) = 2 orang

- c. Yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dan Perencanaan :
 - Diklatpim II = - orang
 - Diklatpim III = -
 - Diklatpim IV = 8 orang

- d. Menurut Jabatan Eselonering dan Fungsional
 - Eselon II/b = - Jabatan
 - Eselon III/a = 1 Jabatan
 - Eselon III/b = 4 Jabatan
 - Eselon IV/a = 9 Jabatan

5. Sarana dan Prasarana/ Asset

Sarana dan Prasarana/ Asset Dinas Pariwisata berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pariwisata tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Jumlah dan Luas Tanah : 24.390M2
- 2. Jumlah dan Luas Bangunan/Gedung :
- 3. Jumlah Kendaraan Dinas : Mobil 1 buah;
Motor 3 buah.

D. PERMASALAHAN – PERMASALAHAN UMUM

Adapun masalah – masalah yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; Pelayanan dan sikap masyarakat diobyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona;
2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata;
3. Kuantitas dan kualitas SDM kepariwisataan masih terbatas;
4. Dana yang tersedia untuk dialokasikan pada Dinas Pariwisata sangat kurang dalam pengembangan pariwisata.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LAKIP.

Sedang Batang Tubuh LAKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LAKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LAKIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LAKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun LAKIP, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI

Pada periode 2025-2026 tidak ada Visi Dinas Pariwisata yang ada hanya Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Periode 2025-2026, adapun visi Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis Dan Sejahtera”**. Adapun keterkaitan dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 (tiga).

2. PERNYATAAN MISI

Terwujudnya Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga visi tersebut bias tercapai dengan hasil yang maksimal.. Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah Misi Bupati dan wakil bupati yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Lebih jauh pernyataan misi Bupati dan Wakil Bupati memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi tersebut adalah yakni **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera**.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pariwisata untuk mengukur sejauhmana Visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang ada keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;

4. SASARAN

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai sasaran penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi jabatan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bidang pariwisata yakni Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

.

5. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, program kerja sumber daya manusia.

Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019-2025 dapat juga ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tujuan	Sasaran	Program
1.Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Berkembangnya Pariwisata Daerah dan Pelestarian Budaya Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
--	--	--

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DinasPariwisata
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Berkembangnya pariwisata daerah dan pelestarian budaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Cakupan Lokasi Wisata yang dikembangkan (%)	33,3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	555.010.000,-
			Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	693.021.637,-
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	711.665.774,-
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	112.012.992,-

			Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi wisata	5.240.800,-
	Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan	5	Program Pemasaran Pariwisata	
	Jumlah wisatawan Nusantara	12.105 org		
			KegiatanPemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	33.940.000,-
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	137.798.000,-
			Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	511.250.000,-
	cakupan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk yang mendapatkan perlindunginya hak kekayaan intelektual	5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	64.002.400,-
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	50	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150.000.000,-
			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	

			Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	168.842.000,-
			Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	41.392.800,-
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	91.277.976,-

Jumlah anggaran :
Program : Rp. 5.311.434.763,-

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.311.434.763,- terdiri dari

- A. Belanja langsung :
- a. Belanja Pegawai : Rp. 1.913.656.502,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.752.827.261,-
 - c. Belanja Modal : Rp. 644.951.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata adalah perwujudan kewajiban Dinas Pariwisata untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 tergambar pada tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2025, Target Belanja dan Realisasi Belanja Dinas Pariwisata sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. Target Belanja | Rp. 5.311.434.763,- |
| b. Realisasi Belanja | Rp. 4.130.085.229,- (77,76%) |
| c. Sisa dalam DPPA | Rp. 1.181.349.534,- (22,24%) |

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

I. Penetapan Indikator Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian realisasi baik realisasi keuangan maupun fisik 100%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan dengan tingkat capaian realisasi baik fisik maupun keuangan 100%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan dengan tingkat capaian realisasi fisik maupun keuangan 100%
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan dengan tingkat capaian realisasi fisik maupun keuangan 100% .
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan dengan tingkat capaian realisasi fisik maupun keuangan 100%.

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan dengan baik dengan tingkat capaian (92,63%) yang digunakan untuk belanja pegawai PNS dari januari s/d desember sebanyak 25 orang, sehingga sisa DPA (7,37%)

b) Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan realisasi (99%) baik fisik maupun keuangan .

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian (100%) baik fisik maupun keuangan.

g) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester SKPD

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian (100) baik realisasi fisik maupun keuangan.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian (100%) baik fisik maupun keuangan.

b) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik baik perjalanan luar daerah dengan tingkat capaian keuangan (99%) sedangkan fisik (100%) dan sisa saldo DPA (1%), karena dari sisa real cost.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

a) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian baik realisasi keuangan maupun fisik dengan tingkat capaian (87%) dengan sisa saldo DPA (13%), karena dari sisa honor tenaga kontrak dan sisa dari belanja air dan listrik.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dimana kegiatan ini bertujuan memelihara kendaraan dinas/operasional yang berjumlah 4 (enam) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 (lima) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan tingkat capaian (90%).

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik untuk pemeliharaan peralatan kantor berupa 1 unit computer, 4 unit laptop dan 5 unit printer dengan tingkat realisasi (100%) baik dari segi fisik maupun keuangan.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

2.1 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa kegiatan penyusunan Dokumen Master Plan untuk 2 lokasi obyek wisata yakni Obyek wisata Laguna Waikuri dan Pantai Mananga Aba, dengan tingkat realisasi fisik 100% sementara realisasi keuangan sebesar 87,67% sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar 22,33%.

b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian baik fisik maupun keuangan sebesar (100%), kegiatan ini berupa pembangunan Kios Cindera Mata dan tempat parkir di pantai Mananga Aba, pembangunan Lopo, Toilet, Pengadon Tnadon dan gerobak sampah di Desa Kadi Pada, sementara di Obyek Wisata watu kanggorok berupa pembangunan Gazebo, rumah pohon, gapura, WC, Coffee shop dan tempat swa foto.

c) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan tingkat realisasi (97.....%) baik realisasi fisik maupun keuangan, yakni berupa pembuatan perpipaan, pemeliharaan pintu toilet, papan loncat, serta pengadaan berupa pengadaan gerobak sampah, perahu kayak, mesin potong rumput dan pengadaan seragam penjaga obyek wisata, terjadinya sisa anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari sumbangan (CSR /Ban NTT) yang baru ditetapkan pada tanggal 26 november 2025 dimana waktu efektif tinggal 10 hari sementara belanja yang rencana yang dianggarkan untuk pembangunan fisik untuk menata obyek wisata di Ratenggaro.

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa memberdayakan masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam menjaga obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah melakukan penarikan retribusi pada obyek wisata laguna waikuri dan pantai Mananga Aba. Dimana

memperkerjakan 6 orang penjaga obyek wisata yang terdiri 4 orang dari penjaga obyek wisata laguna waikuri dan 2 orang dari pantai manga aba.

e) Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi wisata

Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring obyek wisata yg terdata pada data Dinas Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata

A. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

a) Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kab / Kota baik dalam maupun diluar negeri

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian baik fisik maupun keuangan dengan tingkat capaian sebesar (100%) berupa Pembuatan Vidio Promosi yang menampilkan potensi wisata di kabupaten Sumba barat Daya di tiga wilayah yaitu wilayah Kodi, wewewa dan Loura. Baik Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Ekonomi Kreatif, untuk kelengkapan isi konten website.

b) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian 100% Kegiatan berupa mengikuti kegiatan pameran selama 5 (lima) hari di Jakarta dengan melakukan kerja sama dengan INACRAF yakni dari tanggal 8 Februari sd 12 Februari 2025

c) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian 100% baik dari segi keuangan maupun segi fisik,yakni telah terlaksana 2 kegiatan yang dilaksanakan yakni :

- Kegiatan Festival Budaya Sumba Barat Daya yang dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana didalamnya diisi dengan berbagai macam kegiatan diantaranya : Parade Budaya yang diikuti oleh OPD, sekolah-sekolah serta perwakilan dari 11 kecamatan, Lomba Kabuara /Payaghau/khiokong, lomba Tarian tradisional/kreasi serta Lomba Fashion Show Adapun Para pemenangnya sbb:

No	Item Lomba	Pemenang (Juara)			
		I	II	III	IV
1	Kabuara/payaghau/kyhli king/tarian tradisional/kreasi	Kec. Wewewa Tengah	Kec. Lodi Utara	Kec. Loura	Kec. Wewewa Timur
2	Fashion Show		Fadhil Dangga Loma		

- Kegiatan Tour de EnTeTe, kegiatan merupakan kegiatan Lomba Balap Sepeda yang diikuti oleh 13 Negera dengan jumlah peserta 160 orang, yang merupakan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu Daerah di Pulau Sumba yang menjadi ETAPE 5 dan 6 (Finish dan Star)

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

A. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan dan revitalisasi Kota Kreatif

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian 100% baik dari segi keuangan maupun segi fisik,yakni telah terlaksana 2 kegiatan yang dilaksanakan yakni :

- Pelaksanaan Pemasangan Kanopi/ Teras di depan Lapak Kuliner Alun alun Lapangan Galatama yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kalender yang dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 Nopember 2025 di Tambolaka
- Pemasangan 1 unit Tandon sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin diminati di Alun Alun Galatama

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

A. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100% , dimana kegiatan ini Dinas Pariwisata memberikan pelatihan Sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang dengan materi pelatihan kerajinan tangan dari bambu dan produk turunan kain tenun. .sedangkan

realisasi keuangan sebesar 97% sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar 3%.

2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

- Kegiatan ini berupa Kegiatan Sosialisasi sadarwisata yang dilaksanakan di 5 (lima) Desa, yakni Desa maliti Bondo Ate, Desa Moro Manduyo, Desa Kadi Roma, Kadi Wano dengan Desa Watu kawula dengan Jumlah peserta masing-masing 25 orang per Desa, kegiatan dilaksanakan selama lima hari dan dilaksanakan di lokasi Desa masing-masing.
- Kegiatan BIMTEK Pengelolaan Desa Wisata untuk 5 Desa selama 2 (dua) hari di Hotel Sinar Tambolaka
- Kegiatan Monitoring Desa Wisata di 36 Desa Wisata selama 10 Hari.
- Pendampingan dan Monitoring program Pana LPDP di 4 (empat) Desa yakni Desa maliti bondo ate, pero konda, watu kawula dan Desa karuna.

Sedangkan anggaran yang tersisa di DPA merupakan anggaran yang bersumber dari Sumbangan (CSR dari Bank NTT), yang masuk pada anggaran perubahan pergeseran sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksakan kegiatan krn pentapan baru dilaksakan pada tanggal 26 November 2025

B. **Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100% , dimana kegiatan ini Dinas Pariwisata memberikan pelatihan Sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang dengan materi pelatihan kuliner dari bahan lokal. .sedangkan realisasi keuangan sebesar 99% sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar 1%.

I. **Penetapan Perjanjian Kinerja**

Rencana Kinerja merupakan kegiatan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan kebijakan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

a. **KEBIJAKAN**

Adapun kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk menunjang kelancaran Rencana Kinerja pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya Tarik wisata. Kebijakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan.
- Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
- Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADARWISATA
- Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/loca
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan BudayadanPariwisata
- Memberdayakan dan meningkatkan peran industry kecil dan kerajinan rakyat yang member inilait ambah daya tarikwisata.
- Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif.
- Pengembangan kerja sama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.
- Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

b. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, program kerja sumber daya manusia.

Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

c. KEGIATAN

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pariwisata tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
- d) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- b) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

- a) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1.1 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

- a) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
- c) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

- a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
 - a) Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kab / Kota baik dalam maupun diluar negeri
 - b) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - c) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - d) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- (1)** Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan revitalisasi Kota Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

(1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

(2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target-target yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya disusun mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Adapun rencana kinerja tersebut **adalah Data Terlampir**

II. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasinya, dimana akan diketahui sejauh mana tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan.

III. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1(satu) sasaran.

NO	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	94,78%

IV. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kunjungan wisatawan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 62,44%. Dalam usaha mencapai sasaran pada bidang pariwisata, Kepala Daerah menetapkan tiga belas Kebijakan yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan empat indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja Nampak seperti dalam table berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Jumlah pengembangan lokasi pariwisata	33,3	38,89	116,68
2	Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan	100	20,44	20,44
3	Cakupan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk yang mendapatkan perlindunginya hak kekayaan intelektual	5	7	140
4	Persentase ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	51	102
	Rata-rata			94,78

Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini sasaran telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Formulir Sasaran Kinerja RPJMD Periode 2025 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	2025	2024
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase Jumlah pengembangan lokasi pariwisata	33,3	38,89	116,68	33,3
	Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan	100	20,44	20,44	7,75
	Cakupan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk yang mendapatkan perlindunginya hak kekayaan intelektual (50)	5	7	140	0
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	52	102	76,09

Pada tabel di atas dimana tingkat pencapaian sasaran ada semuanya mengalami kenaikan Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari tiga indicator tidak ada yang mencapai diatas 100%. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia / standar kinerja yang diakui secara regional/nasional/Internasional, pencapaian kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu Dibandingkan dengan organisasi sejenis yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang mencapai kinerja sasaran 94,78%, maka pencapaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan.

Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan tidak tercapainya sasaran. Adapun indikator yang belum mencapai target disebabkan antara lain oleh:

1. Status kepemilikan atas obyek wisata masih banyak yg belum ada, sehingga kesulitan dalam melakukan pengembangan obyek wisata baru, yang akhirnya pengembangan obyek wisata tidak mengalami peningkatan.
2. Masih kurang berkembangnya daya tarik destinasi wisata dengan peningkatan saspras pada obyek wisata dan aksesibilitasnya
3. Kurang berekembanngnya industry pariwisata dan ekonomi kreatif serta produk yang mendapatkan hak kekayaan intelektual
4. Promosi pariwisata masih kurang maksimal
5. Masih berkurannngnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif

Untuk mengatasi kegagalan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Status Kepemilikan atas obyek wisata semoga bias dapat diperoleh dengan segera
- 2. Meningkatkan jumlah anggaran untuk pembangunan kawasan wisata
- 3. Meningkatkan pertumbuhan jumlan industry pariwisata dan ekonomi kreatif
- 4. Meningkatkan jumlah promosi pariwisata baik melalui media massa, cetak elektronik maupun media lainnya
- 5. Meningkatkan jumlah SDM pariwisata serta meningkatknya lembaga pariwisata profesional yang terbentuk.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dinas Pariwisata
Realisasi APBD Tahun 2025

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	555.010.000,-	486.556.786,-	87,67
Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	693.021.637,-	682.823.270,-	98,53
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	711.665.774,-	411780.761,-	57,86
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	112.012.992,-	111.378.444,-	99,43
Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi wisata	5.240.800,-	5.240.800	
Program Pemasaran Pariwisata			
KegiatanPemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	33.940.000,-	33.940.000,-	100
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	137.798.000,-	126.944.407,-	99,12

Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	511.250.000,-	510.874.448,-	99,93
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	64.002.400,-	58.002.400,-	9,37
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	168.842.000,-	132.747.359,-	78,62
Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	41.392.800,-	41.306.540,-	99,79
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	91.277.976,-	52.898.750,-	57,95

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp. 4.693.454.912,- atau 88,37% dari total pagu sebesar Rp. 4.173.305.209,-. Berikut realisasi pagu per program Dinas Pariwisata Tahun 2025.

No	Program	Komponen	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaa Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Pariwisata	2.076.951.201,-	1.697.780,-,-	81,74
2	Program Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategi Pariwisata Kab / Kota	Pariwisata	682.988.000,-	671.758.855,-	98,36
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Pariwisata	64.002.400,-	58.002.400,-	90,63

	Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	301.512.776,-	226.952.649,-	75,27
Jumlah			3.125.454.379,-	2.649.390.315,-	84,77

Rincian anggaran realisasi per sasaran dibandingkan TA 2024 terdapat kenaikan begitu pula dengan penyerapan anggaran dari 1.481.019.687,- menjadi 2.649.390.315,- sedangkan pencapaian kinerja program dan kegiatan 88,26 pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai 89,47%.

Dibandingkan penyerapan anggaran sesuai pagu Dinas Pariwisata pada tahun 2024 sebesar 88,26%, sedangkan pada tahun 2025 mencapai sebesar 89,47%, hal ini disebabkan adanya sisa belanja baik belanja gaji, barang dan jasa serta belanja modal yang tidak terealisasi.

Jika dibandingkan capaian kinerja program dan kegiatan sebesar 89,47% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan anggaran baik dari proses pengadaan barang/jasa maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pariwisata tahun 2025 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Pada tahun 2025 Ada banyak keberhasilan yang telah dicapai diantaranya :

1. Terlaksanya pemeliharaan MCK, Lopo, papan loncat, perpipaan di danau waikuri, pembangunan Parkir dan kios cinder mata di pantai mananga aba, pembangunan Lopo, MCK, pangadaan tandon dan gerobak sampah di Desa Kadi pada serta pembangunan Spot foto, lopo, Toilet, Cofee shop, Gerbang masuk dan keluar, rumah pohon dan pengadaan gerobak sampah di Watu kanggorok, mananga aba, weekuri, rate nggaro dan pero konda, serta mesi potong rumput untuk waikuri dan mananga aba.
2. Terlaksanya pemasangan kanopi 2 unit di lapak UMKM dan Pengadaan tandon di Lapak Galatama.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi sadar wisata di 5 desa
4. Terlaksana kegiatan pelatihan, bimbingan Teknis pada pelaku ekonomikreatif sebanyak 15 orang
5. Terlaksannya kegiatan peatihan pengelolaan desa wisata sebanyak 25 orang dari perwakilan 5 desa wisata
6. PAD dari sektor pariwisata mecapai 111,76%
7. Terdatanya di HAKI 8 terdiri dari 7 kelompok pelaku ekonomi kreatif dan 1 produk kebudayaan (PAKALAKA)

Permasalahan – permasalahan yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai
2. Masih kurangnya peminat dari pelaku ekonomi kreatif untuk menyewa kios cinder mata di laguna weekuri.
3. Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena dananya ditetapkan pada anggaran perubahan pergeseran 2025.
4. Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam meleksanakan tupoksi tugasnya masing-masing.

Upaya Pemecahannya

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara baik, maka upaya pemecahan yang dapat kami lakukan adalah sebagai berikut :

1. Tugas – tugas yang sifatnya mendesak dikerjakan secara bersama – sama

2. Untuk kedepannya agar kegiatan yang berupa pembangunan fisik tidak masuk dalam anggaran perubahan
3. Agar setiap item PAD bisa tercapai agar sering melakukan monitoring pada obyek wisata yang menjadi target PAD.

Demikian Laporan ini di sampaikan kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus untuk mendapat petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.

Tambolaka, Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Christofel Horo, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19730812199903100

